

ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PADA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

Elsa Dameria Naibaho¹, Sonia Butar-Butar², Maya A V Purba³, Randa Wijaya⁴,
Valentino Girsang⁵, Pawan D Panjaitan⁶

Universitas Simalungun

e-mail: elsanaibaho914@gmail.com¹, soniabutar139@gmail.com²,
valentinogirsang290204@gmail.com³, wijayaranda692@gmail.com⁴,
mayapurba06@gmail.com⁵

Abstrak – APBD adalah pengelolaan keuangan daerah yang didalamnya terkandung pengeluaran dan pendapatan daerah yang dicatat dan dikelola guna mensejahterakan masyarakat daerah tersebut. Pemerintahan daerah menjadi komponen penting dalam melaksanakan APBD tersebut. Dimana pelaksanaan APBD diserahkan kepada pemerintahan daerah agar supaya pemerintah daerah lebih leluasa dalam memanfaatkan dan mengelola sumberdaya dan potensi di daerah sesuai dengan kebutuhan serta arah pembangunan daerahnya. Guna tercapainya kesejahteraan masyarakat daerah. APBD menjadi indikator seberapa baik kinerja daerah karenanya menunjukkan bagaimana suatu kebijakan direncanakan untuk satu tahun fiskal dan prioritasnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis besarnya laju pertumbuhan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran serta untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) selama tiga tahun terakhir pada laporan keuangan pemerintah kabupaten Simalungun. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan populasi laporan realisasi APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2020-2022. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari laporan realisasi APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2020-2022 (bersumber dari BPS).

Kata Kunci: Anggaran Pendapatan Belanja, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Abstract – The budget is the financial management of the region in which the expenses and income of the region are recorded and managed in order to prosper the people of the area. Local government is an important component in the implementation of the budget. Where the implementation of the Budget is left to the local government so that the local government is more free to utilize and manage the resources and potential in the area according to the needs and direction of development of the region in order to achieve the welfare of the local community. The Budget is an indicator of how well the region is performing, so it shows how a policy is planned for a fiscal year and its priorities. This study aims to analyze the magnitude of the growth rate of the Residual More Budget Calculation and to know and describe the factors that led to the occurrence of Residual More Budget Calculation (SiLPA) during the last three years in the financial statements of the Simalungun district government. This study is a qualitative descriptive study with the population of Simalungun Regency Budget Realization Report for Fiscal Year 2020-2022. The data type used is secondary data sourced from Simalungun Regency Budget realization report for Fiscal Year 2020-2022 (sourced from BPS).

Keywords: Budget Revenue Spending, Remaining Over Budget Calculations

PENDAHULUAN

Menurut Halim dan Kusufi (2012), APBD adalah rencana operasional keuangan pemda, dimana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan pihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan

disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan rencana kerja tahunan untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah baik rutin maupun pembangunan yang diatur dan dengan uang. (Rahayu, 2016), Pasal 84 menyebutkan dalam hal APBD diperkirakan defisit, maka ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan perangkat kebijakan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, APBD juga menjadi sarana bagi pemangku kepentingan tertentu untuk melihat dan mengetahui kemampuan daerah baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran. Dari sisi pendapatan daerah, perkembangan APBD dapat dijadikan dasar perencanaan jangka pendek. Selisih lebih atau kurang antara anggaran pendapatan dan anggaran belanja mengakibatkan surplus atau defisit APBD. Terjadinya Surplus anggaran ketika anggaran pendapatan melebihi anggaran belanja. Sedangkan, Defisit anggaran terjadi ketika anggaran pendapatan kurang dari anggaran belanja. Dalam penyusunan APBD, jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) semestinya sama dengan nol, yang artinya penerimaan pembiayaan harus mampu menutupi terjadinya defisit anggaran.

Nilai positif untuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berarti terdapat pembiayaan bersih setelah dikurangi defisit anggaran masih tersisa, artinya masih adanya dana anggaran dari penerimaan pembiayaan yang belum dimanfaatkan untuk membiayai belanja daerah dan/atau pengeluaran pembiayaan daerah. Namun apabila, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) negatif maka pembiayaan netto belum dapat menutupi defisit anggaran yang terjadi, untuk itu harus dicari jalan keluar misalnya dari sumber pembiayaan lain, seperti utang, menekan pembelanjaan atau pengeluaran pembiayaan sehingga nilai dari SiLPA menjadi nol. Tingginya angka surplus dan juga defisit dalam suatu anggaran mempengaruhi kinerja pemerintah. Anggaran merupakan alat yang efektif sebagai pengendalian dan penilaian kinerja pemerintah mengoreksi kinerjanya melalui hasil akhir anggaran yang diperoleh pada akhir anggaran yang diperoleh pada akhir tahun. Untuk sebuah anggaran yang baik, SiLPA dan SiKPA menjadi dua hal yang sangat dihindari sebab dengan adanya SiLPA dalam satu tahun anggaran memberikan gambaran ketidak cermatan dalam penganggaran dan lemahnya efektifitas realisasi anggaran dalam pelaksanaan APBD serta rendahnya penyerapan belanja modal. Begitu pula jika terjadi SiKPA diartikan bahwa pemerintah kurang cermat dalam menggunakan anggaran yang ada sebab tidak bisa menyesuaikan dengan yang telah ditargetkan atau terdapat ketidak sempurnaan dalam perencanaan kegiatan sehingga mengakibatkan adanya dana dana yang tidak terealisasikan. Kurangnya analisa terhadap SiLPA guna untuk memperbaiki kinerja keuangan suatu daerah sebagai pertanggungjawaban untuk mencapai target dengan kemungkinan bahwa kurangnya memperhatikan perubahan yang terjadi dalam komposisinya, sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya dan tingkat pertumbuhan SiLPA dari tahun ke tahun perlu untuk di teliti. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam menganalisa SiLPA pada APBD di masa yang akan datang. Penelitian ini dilakukan pada APBD Pemerintah daerah Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara di Indonesia dikarenakan besarnya tingkat pertumbuhan SiLPA pada APBD Pemerintah Kabupaten

Simalungun dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2020-2022) dan kemungkinan apa saja yang menyebabkan terjadinya SiLPA dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2020-2022) dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun guna memberikan sumbangan pemikiran sesuai teori yang didapat, yang mungkin dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah mengenai penyerapan APBD yang terjadi di Pemerintahan Daerah Kabupaten Simalungun serta memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat tentang pendapatan dan belanja daerah sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan dana masyarakat oleh pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif kualitatif, yang digunakan untuk menganalisis data APBD kabupaten Simalungun

Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data serta pokok permasalahan didalam anggaran pendapatan belanja daerah adalah metode yang bersifat deskriptif. Metode ini dapat menggambarkan, keadaan, suatu hal dengan cara mendeskripsikannya sedetail mungkin berdasarkan fakta yang ada tentang anggaran pendapatan belanja daerah, sehingga dapat memperoleh hasil dan kesimpulan yang baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dibawah ini adalah yang menjadi data realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Simalungun pada tahun 2020-2022.

Tabel 1

Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020-2022

Tahun	Pendapatan	Belanja	Surplus/Defisit	Penerimaan Pendapatan	Pengeluaran Pembiayaan	Silpa
2020	2.423.099.490.945,00	2.340.664.187.442,00	82.435.303.512,00	3.500.000.000,00	85.935.303.512,00	0
2021	2.355.905.716.606	2.252.487.063.961	103.418.652.645	19.120.688.328	122.539.340.973	0
2022	2.404.665.304.570	2.399.365.095.228	5.300.209.342	1.000.000.000	6.300.209.342	0

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dalam penyusunan APBD jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) semestinya sama dengan nol, yang artinya penerimaan pembiayaan harus mampu menutupi terjadinya defisit anggaran. Maka dapat dilihat dari data realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Simalungun diatas dapat disimpulkan bahwa SiLPA bernilai nol dan dapat diartikan penerimaan pendapatan kabupaten Simalungun mampu menutupi defisit anggaran pada tahun 2020-2022.

Dari data realisasi APBD simalungun diatas dapat dilihat bahwa:

- Pada tahun 2020 terjadi Surplus. Hal ini terjadi karena jumlah pendapatan lebih besar dari pada jumlah belanja yang dimana pendapatan berjumlah 2.423.099.490.945,00 sedangkan belanja berjumlah 2.340.664.187.442,00.
- Pada tahun 2021 terjadi Surplus. Dan ini juga terjadi karena jumlah pendapatan yang lebih besar dari belanja. Adapun jumlah dari pendapatan adalah senilai 2.355.905.716.606 sedangkan belanja daerah berjumlah 2.252.487.063.961.
- Pada tahun 2022 juga terjadi surplus karena pendapatan lebih besar dari belanja.
- Realisasi pendapatan dan belanja tertinggi dapat dilihat pada tahun 2020.

Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah di catat dan dikelola dalam APBD. Dalam penelitian ini data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan dengan peraturan daerah. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah di catat dan dikelola dalam APBD. Dalam penelitian ini data yang digunakan untuk menganalisis SiLPA pada APBD Pemerintah Kabupaten Simalungun adalah Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2020-2022 (tabel 1).

Tabel 2
Realisasi APBD 2020

Uraian	2020		
	APBD	Realisasi	% thd APBD
Pendapatan Daerah	955,62 M	890,25 M	93.16 %
PAD	118.95 M	140,05 M	117.74 %
Pajak Daerah	50,88 M	47,63 M	62.78 %
Retribusi Daerah	14,21 M	8,92 M	62.78 %
Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6,36 M	9,13 M	143.51 %
Lain-lain PAD yang Sah	47,50 M	74,37 M	156.56 %

Tabel 3
Ewalisasi APBD 2021

Uraian	2021		
	APBD	Realisasi	% thd. APBD
Pendapatan daerah	2.355,91 M	2.230,85 M	94.69%
PAD	246,29M	177,65 M	72.13%
Pajak daerah	162,88 M	88,27 M	54.19%
Retribusi Daerah	6,94 M	2,48 M	35.71%
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	18,46M	20,36M	110.31%
Lain-lain PAD yang sah	58,01 M	66,53 M	114.69%

Tabel 4
Realisasi APBD 2022

Uraian	2022		
	APBD	Realisasi	% thd.APBD
Pendapatan daerah	2.404,67M	2.299,09M	95.61%
PAD	220,23M	170,51M	77.42 %
Pajak daerah	107,98M	102,24M	94.76%
Retribusi Daerah	3,33M	2,43M	72.89%
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	17,10M	20,10M	117.51%
Lain-lain PAD yang sah	91,91M	45,74M	49.77%

Pada data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten Simalungun tertinggi pada tahun 2022 yakni sebesar 2.299,09 Miliar, sehingga tercatat 95.61% Sedangkan realisasi terendah terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar 890,25 Miliar dan tercatat 93.16%.

Pendapatan daerah mencakup:

Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain lain PAD yang sah.

- a. Tingkat realisasi pendapatan asli daerah tertinggi pada tahun 2021 dengan nilai 177,65 Miliar dengan persentase 72.13%.
- b. Tingkat realisasi pendapatan asli daerah terendah pada tahun 2020 dengan nilai 140.05 Miliar dengan persentase 117,74%.

Tabel 5
Realisasi Belanja 2020

Uraian	2020		
	APBD	Perk Real	% thd APBD
Belanja Daerah	1.046,42 M	911,99 M	87.17 %
Belanja pegawai	575,13 M	480,30 M	83.51 %
Belanja barang jasa	208,15 M	176,47 M	84.78 %
Belanja modal	191,51 M	159,56 M	83.32 %
Belanja Lainnya	71,44 M	95,65 M	133.88 %

Tabel 6
Realisasi Belanja 2021-2022

Uraian	2021			2022		
	APBD	Realisasi	% thd. APBD	APBD	Perk real	% thd.APBD
Belanja daerah	2,252,49M	2.060,06 M	91.46%	2.399,37M	2.239,71M	93.35%
Belanja pegawai	1.087,10 M	915,53 M	84.22%	1.098,71M	901,03M	82.01%
Belanja barang dan jasa	1.087,10 M	915,53 M	84,22%	435,15M	510,49M	117.32%
Belanja modal	142,64M	216,40M	151.71%	257,73M	352,66M	136.83%
Belanja lainnya	636,38 M	566,80 M	89.07%	607,78M	475,53M	78.24%

Pada tabel data realisasi belanja diatas dapat dilihat bahwa realisasi yang tertinggi pada tahun 2022 dengan nilai 2.239,71 Miliar sehingga tercatat 93.35 % terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dan realisasi belanja daerah terendah pada tahun 2020 senilai 911,99 Miliar sehingga tercatat 87.17 % hubungan terhadap anggaran pendapatan belanja daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka sesuai dengan tujuan penelitian dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini. Pertama, Tingkat pertumbuhan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2020-2022 berfluktuasi. Dengan itu, Anggaran pendapatan belanja daerah Simalungun tidak mempengaruhi SiLPA hal itu dikarenakan penerimaan pembiayaan mampu menutupi terjadinya defisit anggaran pada tahun 2021-2022. Cukup Efisien sebab perencanaan peningkatan pendapatan yang mampu mengalokasikan dana dengan baik sehingga terjadinya penghematan belanja. Diungkapkan secara efektif dalam pengelolaan dimana pendapatan dan belanja yang diperoleh tidak jauh berbeda dari apa yang telah dianggarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Simalungun. 2020. Statistik Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten simalungun 2020-2022. simalungun: BPS Sumut.
- Amran, Darwanis, & Syukriy, A. (2015, Februari). Pengaruh Perubahan Pendapatan Asli Daerah, Perubahan Dana Bagi Hasil, dan Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Perubahan Belanja Bantuan Sosial (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh). Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 4(1), 1-10 (Rahayu, 2016), Pasal 84 menyebutkan dalam hal APBD diperkirakan deficit.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 27 Tahun 2013, Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 23 ayat (1) menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa SiLPA bersumber dari pelampauan penerimaan PAD.

Ahmad, S. (2016, Februari). Analisis Flypaper Effect Pada Pengujian Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau), Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (Silpa) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah di Indonesia (Studi Tahun 2012-2014).

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.